

SKRIPSI

TINJAUAN EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMBERIAN KREDIT PADA PT BANK ABC

PAHLEVI DWI RIZALY



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016**

SKRIPSI

TINJAUAN EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMBERIAN KREDIT PADA PT BANK ABC

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**PAHLEVI DWI RIZALY
A31111104**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016**

SKRIPSI

TINJAUAN EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMBERIAN KREDIT PADA PT BANK ABC

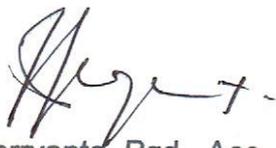
disusun dan diajukan oleh

PAHLEVI DWI RIZALY
A31111104

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 28 Maret 2016

Pembimbing I



Drs. H. Harryanto, Pgd., Acc., M.Com., Ph.D.
NIP 195312101987021001

Pembimbing II



Rahmawati H.S., S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 197511052007012001



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 196509251990022001

SKRIPSI

TINJAUAN EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMBERIAN KREDIT PADA PT BANK ABC

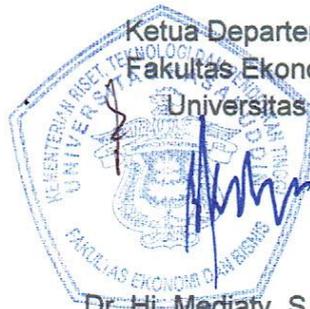
disusun dan diajukan oleh

PAHLEVI DWI RIZALY
A31111104

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **28 April 2016** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	TandaTangan
1.	Drs. H. Harryanto, Pgd., Acc., M.Com., Ph.D.	Ketua	1.....
2.	Rahmawati H.S., S.E., M.Si., Ak.,CA	Sekretaris	2.....
3.	Drs. Syahrir, Ak., M.Si., CA	Anggota	3.....
4.	Drs. H. Muallimin, M.Si.	Anggota	4.....



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 196509251990022001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Pahlevi Dwi Rizaly

NIM : A31111104

departemen/program studi : Akuntansi/ Strata Satu

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

TINJAUAN EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMBERIAN KREDIT PADA PT BANK ABC

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 28 Maret 2016

Yang membuat pernyataan,



Pahlevi Dwi Rizaly

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Pertama-tama, ucapan terima kasih peneliti berikan kepada Bapak Drs. H. Harryanto, Pgd., Acc., M.Com., Ph.D., dan Ibu Rahmawati H.S., S.E., Ak., M.Si., CA, sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah dituangkan untuk membimbing, dan memberi motivasi, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan peneliti. Kedua, ucapan terima kasih peneliti berikan kepada seluruh staf dosen pengajar dan staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas ilmu dan bantuan yang diberikan.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayah peneliti, Ir. Asran Rizaly dan ibu peneliti, Nikmawaty beserta keluarga peneliti atas bantuan, nasihat, dan motivasi yang diberikan selama penelitian skripsi ini. Semoga bantuan yang diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Terakhir, ucapan terima kasih kepada teman-teman peneliti khususnya Noni Paramita Sudarli, S.E. yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini, sahabat "Outlaws", "Bimilfa", rekan mahasiswa Akuntansi FEB Unhas angkatan 2011(I11inois), dan sahabat "Semua Senang". Semoga pihak mendapat kebaikan dari-Nya atas bantuan yang diberikan hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, 28 Maret 2016

Peneliti

ABSTRAK

TINJAUAN EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMBERIAN KREDIT PADA PT BANK ABC

REVIEW ON EFFECTIVENESS INTERNAL CONTROL SYSTEM OF IMPLEMENTATION LENDING AT PT BANK ABC

Pahlevi Dwi Rizaly
Harryanto
Rahmawati H.S.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan sistem pengendalian intern pemberian kredit oleh PT Bank ABC. Data penelitian ini diperoleh dari wawancara dan beberapa observasi lainnya, dan menggunakan metode kualitatif. Manfaat pengendalian internal dalam perbankan sangat penting mengingat aktivitas pemberian kredit penuh dengan risiko. Jika bank sudah mempunyai pengendalian internal yang baik maka efektivitas prosedur pemberian kredit juga akan baik. Dalam hasil wawancara dengan Kepala Wilayah pada PT Bank ABC hanya terdapat dua jawaban yang tidak relevan dari lima puluh tiga pertanyaan wawancara yang diajukan. Maka dari itu prosedur efektivitas pemberian kredit serta sistem pengendalian internal pemberian kredit yang dilaksanakan PT Bank ABC jelas dan sangat baik.

Kata Kunci: efektivitas, sistem pengendalian internal, pemberian kredit.

This study aims to determine the effectiveness of the internal control system of credit by PT Bank ABC. Data used in this research were obtained from interviews and several other observations, and using qualitative methods. Benefits of internal control in the banks is very important considering lending activity fraught with risk. If the bank already has a good internal control, the effectiveness of procedures for granting credit would also be good. In the interview with the Regional Head at PT Bank ABC there are only two answers were irrelevant from fifty three interview questions asked. Therefore the effectiveness of the credit granting procedures and internal control systems of credit held by PT Bank ABC clear and very good.

Key Words: effectiveness, internal control system, implementation lending.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Sistem Pengendalian Internal.....	6
2.1.1 Definisi Sistem Pengendalian Internal.....	6
2.1.2 Komponen Sistem Pengendalian Internal.....	7
2.1.3 Keterbatasan Pengendalian Internal.....	9
2.2 Kredit.....	11
2.2.1 Pengertian Kredit.....	11
2.2.2 Unsur-Unsur Kredit.....	12
2.2.3 Pihak-Pihak dalam Kredit.....	13
2.2.4 Tujuan dan Fungsi Kredit.....	13
2.2.5 Jenis-Jenis Kredit.....	16
2.2.6 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit.....	20
2.2.7 Kebijakan Perkreditan Bank.....	24
2.2.8 Prosedur Pemberian Kredit.....	26
2.2.8.1 Permohonan Kredit.....	26
2.2.8.2 Penyidikan dan Analisis Kredit.....	28
2.2.8.3 Keputusan dan Permohonan Kredit.....	29
2.2.8.4 Penolakan Permohonan Kredit.....	30
2.2.8.5 Persetujuan Permohonan Kredit.....	31
2.2.8.6 Pencairan Fasilitas Kredit.....	32
2.2.8.7 Pelunasan Fasilitas Kredit.....	32
2.3 Efektivitas.....	33
2.3.1 Pengertian Efektivitas.....	33
2.3.2 Ukuran Efektivitas.....	34
2.4 Pengendalian Kredit Bank.....	34
2.4.1 Pengertian dan Tujuan Pengendalian Kredit Bank.....	34
2.4.2 Sistem dan Jenis Pengendalian Kredit.....	35

BAB III METODE PENELITIAN.....	37
3.1 Rancangan Penelitian.....	37
3.2 Lokasi Penelitian	37
3.3 Jenis dan Sumber Data	37
3.4 Metode Pengumpulan Data	38
3.5 Metode Analisis	38
 BAB IV HASIL PENELITIAN.	 41
4.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	41
4.2 Sistem Pemberian Kredit PT Bank ABC	42
4.3 Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit PT Bank ABC.....	45
4.3.1 Lingkungan Pengendalian	45
4.3.2 Penafsiran Risiko.....	46
4.3.3 Aktivitas Pengendalian	47
4.3.4 Informasi dan Komunikasi	48
4.3.5 Pemantauan	49
4.4 Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Kredit PT Bank ABC	50
4.5 Perbandingan Studi Kasus PT Bank ABC dengan Teori COSO dan Analisis Kekuatan dan Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit PT Bank ABC....	58
4.5.1 Perbandingan Studi Kasus PT Bank ABC dengan Teori COSO.....	58
4.5.2 Analisis Kelebihan dan Kelemahan.....	59
 BAB V PENUTUP	 61
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran	61
5.3 Keterbatasan Penelitian	62
 DAFTAR PUSTAKA.....	 63
LAMPIRAN	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1 Proses Pemberian Kredit.....	44

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Data Kredit Bermasalah	3
4.1	Persyaratan Calon Debitur	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Struktur Organisasi	66
2	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner	67
3	Peta Teori	68
4	Daftar Pertanyaan Kuesioner	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aktivitas bisnis merupakan fenomena yang sangat kompleks karena mencakup berbagai bidang diantaranya yaitu hukum, ekonomi, dan politik. Perkembangan perekonomian nasional dan perubahan lingkungan strategis yang dihadapi dunia usaha termasuk usaha kecil menengah saat ini sangat cepat dan dinamis. Dalam kehidupan masyarakat dapat dilihat bahwa aktivitas manusia dalam dunia bisnis tidak lepas dari peranan bank selaku pemberi layanan perbankan bagi masyarakat. Dunia usaha khususnya sektor usaha kecil dan menengah menjadi salah satu potensi yang harus dikembangkan dalam rangka mendorong pencapaian tujuan nasional yang berkaitan dengan peningkatan dan pemerataan hidup masyarakat. Kondisi ini mengharuskan setiap pengusaha baik kecil maupun menengah melakukan upaya demi menstabilkan atau lebih meningkatkan eksistensi usahanya. Salah satu masalah yang umumnya menjadi penghambat adalah masalah permodalan usaha kecil dan menengah.

Hasibuan (2006) menyatakan bahwa bank sangat penting dan berperan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian suatu bangsa karena bank adalah:

1. Pengumpul dana dari SSU (*Surplus Spending Unit*) atau masyarakat yang kelebihan dana, dan penyalur kredit kepada DSU (*Defisit Spending Unit*) atau masyarakat yang membutuhkan dana.
2. Tempat menabung yang efektif dan produktif bagi masyarakat.
3. Pelaksana dan memperlancar lalu lintas pembayaran dengan aman, praktis, dan ekonomis.
4. Penjamin penyelesaian perdagangan dengan menerbitkan *letter of credit*.

5. Penjamin penyelesaian proyek dengan menerbitkan bank garansi

Bank adalah sendi kemajuan masyarakat dan sekiranya tidak ada bank maka tidak akan ada kemajuan seperti saat ini, negara yang tidak mempunyai banyak bank yang baik dan benar adalah negara yang terbelakang. Bank merupakan salah satu sumber permodalan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sehingga bank dituntut peran sertanya untuk mensukseskan pembangunan melalui jasa kredit yang sangat dibuthkan masyarakat.

Fasilitas pemberian kredit yang diberikan bank merupakan aset terbesar bagi bank. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengawasan pemberian kredit harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang memadai demi keamanan. Proses pemberian kredit dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian agar fasilitas kredit yang diberikan tepat sasaran. Pemberian kredit harus dilaksanakan sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan bank. Kebijakan bank tersebut antara lain melakukan penilaian kelayakan terhadap calon debitur. Hal ini dilakukan untuk mempertimbangkan risiko-risiko yang akan terjadi termasuk kemungkinan timbulnya kredit macet.

Kelancaran penyaluran kredit sangat tergantung peranan bank itu sendiri dan kesadaran pihak debitur untuk menyelesaikan kredit sebagaimana yang telah disepakati. Dengan adanya prosedur penyaluran kredit yang efisien dan efektif diharapkan kebutuhan nasabah dapat terpenuhi dan risiko kegagalan kredit menjadi kecil. Masalah keamanan atas kredit yang diberikan merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh bank, karena adanya risiko yang timbul dalam sistem pemberian kredit. Permasalahan itu bisa dihindari dengan adanya suatu pengendalian internal yang dapat menunjang efektivitas sistem pemberian kredit.

Untuk menghindari dan meminimalkan kredit yang bermasalah maka diperlukan adanya kontrol yang baik dari perusahaan terhadap prosedur pemberian fasilitas kredit. Kontrol yang dimaksud adalah Pengendalian Internal.

Pengendalian internal adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan perusahaan.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa pengendalian internal merupakan komponen penting dalam manajemen bank dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional bank. Terselenggaranya sistem pengendalian internal bank yang sehat dan efektif menjadi tanggung jawab dari semua pengurus dan para pejabat bank. Pengendalian internal perlu mendapat perhatian khusus mengingat bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya kesulitan usaha bank adalah berbagai kelemahan dalam pelaksanaan sistem pengendalian internal bank.

Pengendalian internal yang memadai pada dasarnya bertujuan untuk melindungi harta milik organisasi dengan meminimalkan kemungkinan terjadinya penyelewengan, pemborosan, kredit macet, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Dengan pengendalian internal yang memadai diharapkan dapat menjamin proses pemberian kredit tersebut akan dapat terhindar dari kesalahan dan penyelewengan-penyelewengan.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan asisten Regional Manajer PT. ABC terungkap bahwa perkreditan yang sering bermasalah di PT. ABC ada Kredit Pemilikan Rumah.

Tabel 1.1.
Data Kredit Bermasalah PT ABC
(Dalam ribuan rupiah)

Kolektibilitas Kredit	2013	2014	2015*
Lancar	4,075,622,603	3,977,419,073	358,304,318
Dalam perhatian Khusus	98,660,548	95,754,067	142,182,661
Kurang Lancar	6,694,073	14,233,414	16,291,798
Diragukan	10,177,343	6,664,358	23,625,086
Macet	34,136,986	61,307,191	72,215,845

Sumber: PT Bank ABC (Juli 2015)

Hal tersebut bisa jadi disebabkan karena sistem pengendalian internal yang kurang memadai.

Kredit Pemilikan Rumah ini adalah fasilitas untuk membeli rumah dengan kredit bank. Prinsip KPR adalah membiayai terlebih dahulu biaya atau pembangunan rumah, dan dana untuk membayar balik dilakukan dengan cicilan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis memilih judul “Tinjauan Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit pada PT ABC”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimana prosedur pemberian kredit PT ABC?
2. Bagaimana sistem pengendalian internal pemberian kredit pada PT ABC?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui prosedur pemberian kredit PT ABC.
2. Mengetahui penerapan sistem pengendalian internal pemberian kredit pada PT ABC.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai efektivitas sistem pengendalian internal pemberian kredit.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai efektivitas sistem pengendalian internal pemberian kredit yang baik guna meminimalkan jumlah kredit macet pada bank.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang landasan teori yang menguraikan teori-teori penelitian ini mengenai efektivitas, kredit, sistem pengendalian internal, serta pengendalian kredit bank.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, responden, metode, metode analisis.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, visi dan misi perusahaan, serta pembahasan mengenai hasil penelitian yang telah dilaksanakan berdasarkan metode analisis yang digunakan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan penelitian, saran untuk pihak-pihak yang berkepentingan, serta keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Pengendalian Internal

2.1.1 Definisi Sistem Pengendalian Internal

Sumarsan (2010:4) mendefinisikan sistem pengendalian manajemen sebagai suatu rangkaian tindakan dan aktivitas yang terjadi pada seluruh kegiatan organisasi dan berjalan secara terus-menerus. Pengendalian internal merupakan kegiatan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan usaha. Jusup (2001:252) mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu proses yang dijalankan dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini.

1. Keandalan laporan keuangan.
2. Efektivitas dan efisiensi kegiatan operasi.
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Mulyadi (2002:67) mendefinisikan pengendalian internal adalah proses yang diimplementasikan oleh dewan direksi, serta seluruh karyawan di bawah arahan mereka dengan tujuan untuk memberikan jaminan yang memadai atas tercapainya tujuan pengendalian. Tujuan pengendalian tersebut meliputi efektivitas dan efisiensi operasi, reliabilitas pelaporan keuangan, serta kesesuaian dengan aturan dan regulasi yang ada.

Dalam laporan *Commitee of Sponsoring Organizations (COSO)* juga menekankan bahwa konsep fundamental dinyatakan dalam definisi berikut:

- a. Pengendalian internal merupakan suatu proses. Ini berarti alat untuk mencapai suatu akhir, bukan akhir itu sendiri. Pengendalian internal terdiri dari serangkaian tindakan yang meresap terintegrasi dengan, tidak ditambahkan ke dalam, infrastruktur suatu entitas.
- b. Pengendalian internal dilaksanakan oleh orang. Pengendalian internal bukan hanya suatu manual kebijakan dan formulir-formulir, tetapi orang pada berbagai tingkatan organisasi, termasuk dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya.
- c. Pengendalian internal dapat diharapkan untuk menyediakan hanya keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak, kepada manajemen dan dewan direksi suatu entitas karena keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian internal dan perlunya untuk mempertimbangkan biaya dan manfaat relatif dari pengadaan pengendalian.

Pengendalian internal diarahkan pada pencapaian tujuan dalam kategori yang saling tumpang tindih dari pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi.

2.1.2 Komponen Sistem Pengendalian Internal

Boynton (2003:374) menyatakan bahwa untuk menyediakan suatu struktur dalam mempertimbangkan banyak kemungkinan pengendalian yang berhubungan dengan tujuan entitas, laporan *Committe of Sponsoring Organizations* (COSO) mengidentifikasi lima komponen pengendalian internal yang saling berhubungan, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Menetapkan suasana suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari semua komponen pengendalian internal lainnya, yang menyediakan disiplin dan struktur.

2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Merupakan pengidentifikasian dan analisis entitas mengenai risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan entitas, yang membentuk suatu dasar mengenai bagaimana risiko harus dikelola.

3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme yang memberikan arah bagi manajemen, seperti: proses ketaatan pada ketentuan tentang perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Aktivitas pengendalian merupakan bagian yang menyatu atau integral dari proses perencanaan pelaksanaan, pengkajian.

4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Merupakan pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan kerangka waktu yang membuat orang mampu melaksanakan tanggung jawabnya.

5. Pemantauan (*Monitoring*)

Merupakan suatu proses yang menilai kualitas kinerja pengendalian internal pada suatu waktu.

2.1.3 Keterbatasan Pengendalian Internal

Pengendalian internal setiap entitas memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, pengendalian internal hanya dapat menyediakan keyakinan yang memadai bukan mutlak kepada manajemen dan dewan direksi berkenaan dengan pencapaian tujuan entitas. Seperti yang dikuti oleh Boynton (2003:375) *Consideration of Internal Control in a Financial Statement Audit* mengidentifikasi keterbatasan yang melekat berikut yang menjelaskan mengapa pengendalian internal sebaik apapun ia dirancang dan dioperasikan, hanya dapat menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan pengendalian suatu entitas.

Keterbatasan pengendalian internal yaitu:

1. Kesalahan dalam pertimbangan

Terkadang, manajemen dan personil-personil dapat melakukan pertimbangan yang buruk dalam melaksanakan tugas rutin atau membuat keputusan bisnis karena informasi yang tidak mencukupi, keterbatasan waktu, atau prosedur lainnya.

2. Kemacetan

Kemacetan dalam melaksanakan pengendalian dapat terjadi ketika personil personil telah melakukan kesalahan yaitu membuat kekeliruan akibat kecerobohan atau salah memahami instruksi, kelelahan, atau kebingungan. Perubahan sementara atau permanen dalam personil atau dalam sistem atau prosedur juga dapat berkontribusi pada terjadinya kemacetan.

3. Kolusi

Individu yang bertindak bersama, seperti karyawan yang melaksanakan suatu pengendalian penting bertindak bersama dengan karyawan lain,

konsumenn atau pemasok, dapat melakukan sekaligus menutupi kecurangan sehingga tidak dapat dideteksi oleh pengendalian internal (misalnya, kolusi antara tiga karyawan mulai dari departemen personal, manufaktur, dan penggajian untuk membuat pembayaran kepada karyawan fiktif, atau skedul pembayaran kembali antara seorang karyawan dalam departemen pembelian dan pemasok atau antara seorang karyawan di departemen penjualan dengan pelanggan).

4. Penolakan Manajemen

Manajemen dapat mengesampingkan kebijakan atau prosedur tertulis untuk tujuan tidak sah seperti keuntungan pribadi atau presentasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas yang dinaikkan atau status ketaatan (misalnya, menaikkan laba yang dilaporkan untuk menaikkan pembayaran bonus atau nilai pasar dari saham entitas, atau menyembunyikan pelanggaran dari perjanjian hutang atau ketidaktaatan terhadap hukum dan peraturan). Praktik penolakan termasuk membuat penyajian yang salah dengan sengaja kepada auditor dan lainnya seperti menerbitkan dokumen palsu untuk mendukung pencatatan transaksi penjualan fiktif.

5. Biaya versus manfaat

Biaya pengendalian internal suatu entitas seharusnya tidak melebihi manfaat yang diharapkan untuk diperoleh. Karena pengukuran yang tepat baik dari biaya dan manfaat biasanya tidak memungkinkan, manajemen harus membuat baik estimasi kuantitatif maupun kualitatif dalam mengevaluasi hubungan antara biaya dan manfaat.

2.2 Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Pengertian Kredit pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Hasibuan (2006:92), "kredit adalah semua jenis pinjaman baik uang atau barang yang wajib dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam". Kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, sehingga transaksi kredit yang menyangkut uang merupakan alat kredit. Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dan debitur. Mereka telah menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Singkatnya, kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen, kepercayaan, risiko, dan pertukaran ekonomi dimasa-masa mendatang.

Adapun menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) 2001 yang dikutip dari buku Pengantar Manajemen Perkreditan oleh Irham, Fahmi dan Yovi (2010:3) mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungannya.

Sedangkan pengertian kredit menurut Hasibuan (2006:87) dalam bukunya Dasar-Dasar Perbankan menyatakan bahwa kredit adalah semua jenis

pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

2.2.2 Unsur-Unsur Kredit

Unsur-Unsur dalam suatu kredit adalah:

- a. kepercayaan, yang berarti bahwa pemberi kredit yakin bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu di masa yang akan datang.
- b. Kesepakatan, dimana dituangkan dalam suatu perjanjian dan masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah.
- c. Jangka Waktu, dimana mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.
- d. Risiko, faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar risikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja maupun risiko yang tidak disengaja.

Balas Jasa, dimana dalam bentuk bunga, biaya provisi, dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan Bank. Sedangkan Bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.2.3 Pihak-Pihak Dalam Kredit

Para pihak dalam kredit pada dasarnya hanya dua, yaitu pihak kreditur (Bank) dan pihak debitur. Namun masalahnya akan menjadi lain apabila barang jaminan diberikan oleh pihak ketiga yang turut serta menandatangani perjanjian kredit (hutang-piutang) atau Personal Guarantee diberikan oleh pihak ketiga. Jadi disini pihak ketiga bertindak sebagai penjamin. Hal itu akan berdampak luas apabila debitur wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang dimaksudkan dalam kontrak yang bersangkutan.

2.2.4 Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank. Menurut Kasmir (2002:105) tujuan pemberian kredit yaitu:

1. Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu usaha nasabah

Untuk membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja.

3. Membantu pemerintah

Membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil. Disamping memiliki tujuan, kredit juga memiliki fungsi yang sangat luas.

Menurut Kasmir (2002:105) fungsi kredit secara luas tersebut antara lain:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari

satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar. Kredit untuk meningkatkan peredaran barang biasanya untuk kredit perdagangan atau kredit ekspor impor.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat pula membantu mengekspor barang dari dalam negeri keluar negeri sehingga dapat meningkatkan devisa negara.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi penerima kredit (nasabah) yang memang modalnya pas-pasan. Dengan memperoleh kredit, nasabah bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka akan semakin baik terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional, akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama di bidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.

2.2.5 Jenis-Jenis Kredit

Beragam jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan akan kebutuhan jenis kreditnya. Dalam praktiknya kredit yang ada di masyarakat terdiri dari beberapa jenis, begitu pula dengan pemberian fasilitas kredit oleh Bank kepada masyarakat. Pemberian fasilitas kredit oleh Bank dikelompokkan ke dalam jenis yang masing-masing dilihat dari berbagai segi. Pembagian jenis ini ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu. Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh Bank dan dilihat dari berbagai segi adalah:

1. Dilihat dari segi kegunaan

Maksud dari jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan atau hanya kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaan terdapat dua jenis yaitu :

- a) Kredit Investasi, yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru di mana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relative lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.
- b) Kredit Modal Kerja, merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Dilihat Dari Segi Tujuan Kredit

Kredit jenis ini dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit, apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi.

Jenis kredit dilihat dari segi tujuannya adalah:

- a) Kredit Produktif, kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu yang baik berupa barang maupun jasa.
- b) Kredit Konsumtif, merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.
- c) Kredit Perdagangan, merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

3. Dilihat Dari Segi Jangka Waktu

Dilihat dari segi jangka waktu, artinya lamanya masa pemberian kredit mulai dari pertama sekali diberikan sampai masa pelunasannya, jenis kredit ini adalah:

- a) Kredit Jangka Pendek

- b) Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
 - c) Kredit Jangka Menengah
Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja.
 - d) Kredit Jangka Panjang
Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.
4. Dilihat dari jaminan, maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan adalah:
- a) Kredit Dengan Jaminan
Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud.
 - b) Kredit Tanpa Jaminan
Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atas nama baik calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

5. Dilihat Dari Segi Sektor Usaha

Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda, oleh karena itu pemberian fasilitas kredit berbeda pula. Jenis kredit jika dilihat dari sektor usaha sebagai berikut:

a) Kredit Pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

b) Kredit Peternakan

Dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek, maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan untuk jangka panjang ternak kambing atau sapi.

c) Kredit Industri

Yaitu kredit untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah atau besar.

d) Kredit Pertambangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak, atau tambang timah.

e) Kredit Pendidikan

Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk mahasiswa yang sedang belajar.

f) Kredit Profesi

Merupakan kredit yang diberikan kepada kalangan para profesional seperti, dosen, dokter atau pengacara.

g) Kredit Perumahan

Merupakan kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

6. Tangkilisian (2003:52) menyebutkan terdapat jenis kredit menurut kolektibilitas kelancaran kredit.
- a. Kredit Lancar, yaitu kredit yang pembayarannya lancar atau tepat waktu. Artinya segala kewajiban (bunga dan angsuran pokok) diselesaikan oleh nasabah secara baik.
 - b. Kredit Dalam Perhatian Khusus, yaitu terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 hari.
 - c. Kredit Kurang Lancar, yaitu terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai 180 hari.
 - d. Kredit Diragukan, yaitu terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai 270 hari.
 - e. Kredit Macet, yaitu tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari.

2.2.6 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Jaminan Kredit yang diberikan nasabah kepada bank hanyalah merupakan tambahan, terutama untuk melindungi kredit yang macet akibat suatu musibah. Akan tetapi apabila suatu kredit diberikan telah dilakukan penelitian secara mendalam, sehingga nasabah sudah dikatakan layak untuk memperoleh kredit, maka fungsi jaminan kredit hanyalah untuk berjaga-jaga. Oleh karena itu dalam pemberian kreditnya Bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar.

Artinya sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh Bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya.

Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C, yang terdiri atas:

1. *Character*, adalah sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang nasabah, baik yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial.
2. *Capacity* (capability) adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat "kemampuannya" dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.
3. *Capital*, adalah untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas* dan *solvabilitasnya*, *rentabilitas* dan ukuran lainnya. *Analisis capital* juga harus menganalisis sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

4. *Collateral*, adalah merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.
5. *Condition*, adalah menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Penilaian kredit dengan menggunakan 7P menurut Kasmir (2010:119) adalah sebagai berikut:

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu. Penilaian *personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Nasabah yang digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan

kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif dan lain-lain.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal terpenting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapat jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Serta penilaian kredit dengan prinsip 3R yaitu:

1. *Returns*

Penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitur setelah memperoleh kredit. Apabila hasil yang diperoleh cukup untuk membayar pinjamannya dan sekaligus membantu perkembangan usaha calon debitur bersangkutan maka kredit diberikan. Akan tetapi, jika sebaliknya maka kredit jangan diberikan.

2. *Repayment*

Memperhitungkan kemampuan, jadwal, dan jangka waktu pembayaran kredit oleh calon debitur, tetapi perusahaannya tetap berjalan.

3. *Risk Bearing Ability*

Memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon debitur untuk menghadapi risiko, apakah perusahaan calon debitur risikonya besar atau kecil. Kemampuan perusahaan menghadapi risiko ditentukan oleh besarnya modal dan strukturnya, jenis bidang usaha, dan manajemen perusahaan bersangkutan. Jika *risk bearing ability* perusahaan besar maka kredit tidak diberikan, tetapi apabila *risk bearing ability* perusahaan kecil maka kredit akan diberikan.

2.2.7 Kebijakan Perkreditan Bank

Kebijakan perkreditan Bank harus diprogram dengan baik dan benar. Program perkreditan harus didasarkan pada asas yuridis, ekonomis, dan kehati-hatian. Yuridis artinya program perkreditan harus sesuai dengan undang-undang perbankan dan ketetapan Bank Indonesia. Ekonomis artinya menetapkan rentabilitas yang ingin dicapai dan tingkat bunga kredit yang disalurkan. Kehati-

hatian artinya besar plafond kredit (*Legal Lending Limit* = Batasa Maksimum Pemberian Kredit atau BMPK) harus ditetapkan atas hasil analisis yang baik dan objektif berdasarkan asas 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*), 7P (*Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection*), dan 3R (*Returns, Repayment, Risk Bearing Ability*) dari setiap calon peminjam.

Kebijaksanaan (*Policy*) adalah suatu pedoman yang menyeluruh, baik lisan maupun tulisan yang memberikan suatu batas umum dan arah tempat *management action* akan dilakukan (GR Terry). Kebijakan per Kreditan menurut Hasibuan (2006:92) antara lain:

1. *Bankable*, artinya kredit yang akan dibiayai hendaknya memenuhi kriteria:
 - a. *Safety*, yaitu dapat diyakini kepastian pembayaran kembali kredit sesuai jadwal dan jangka waktu kredit.
 - b. *Effectiveness*, artinya kredit yang diberikan benar-benar digunakan untuk pembiayaan, sebagaimana dicantumkan dalam proposal kreditnya.
2. Kebijakan investasi merupakan penanaman dana yang ada selalu dikaitkan dengan sumber dana yang bersangkutan. Investasi dana ini disalurkan dalam bentuk investasi penyebaran kredit, serta kebijakan tingkat bunga.
 - a. Investasi primer, yaitu investasi yang dilakukan untuk pembelian sarana dan prasarana bank seperti pembelian kantor, mesin, dan ATK. Dana investasi primer harus dari dana sendiri karena sifatnya tidak produktif dan jangka waktunya panjang. Investasi

primer ini mutlak harus dilakukan karena merupakan motor kegiatan operasional bank.

- b. Investasi sekunder, yaitu investasi yang dilakukan dengan meyalurkan kredit kepada masyarakat (debitur). Investasi ini sifatnya produktif (menghasilkan). Jangka waktu penyaluran kredit harus disesuaikan dengan lamanya tabungan agar likuidasi bank tetap terjamin.
3. Kebijakan risiko, maksudnya dalam penyaluran kredit harus memperhitungkan secara cermat indikator yang dapat menyebabkan risiko macetnya kredit dan menetapkan cara-cara penyelesaiannya.
4. Kebijakan penyebaran kredit, maksudnya kredit harus disalurkan kepada beranekaragam sektor ekonomi, semua golongan ekonomi, dan dengan jumlah peminjam yang banyak.

Kebijakan tingkat bunga, maksudnya dalam pemberian kredit harus memperhitungkan situasi moneter, kondisi perekonomian, persaingan antarbank, dan tingkat inflasi untuk menetapkan besarnya suku bunga kredit.

2.2.8 Prosedur Pemberian Kredit

2.2.8.1 Permohonan Kredit

Prosedur pemberian kredit merupakan tahap-tahap yang harus dilalui sebelum suatu kredit diputuskan untuk diberikan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit. prosedur pemberian kredit oleh dunia perbankan antara bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari bagaimana cara-cara bank tersebut menilai serta persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing bank.

Menurut Suryatmo (2003:69) prosedur perkreditan yang harus ditangani oleh bank yaitu:

1. Tahap Permohonan Kredit

Permohonan fasilitas kredit mencakup:

- a. Permohonan baru untuk mendapatkan suatu fasilitas kredit.
- b. Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan.
- c. Permohonan perpanjangan pembaharuan masa lalu kredit yang telah berakhir jangka waktunya.
- d. Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat fasilitas kredit yang berjalan, antara lain penukaran jaminan, perubahan/pengunduran jadwal angsuran dan lain sebagainya.

2. Berkas

Setiap berkas permohonan kredit dari nasabah terdiri dari:

- a. Surat-surat permohonan nasabah yang ditandatangani secara lengkap dan sah.
- b. Daftar isian yang disediakan oleh bank yang secara sebenarnya dan lengkap diisi oleh nasabah.
- c. Daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis fasilitas kredit.

3. Pencatatan

Setiap surat permohonan kredit yang diterima harus dicatat khusus yang disediakan.

4. Kelengkapan dan Berkas Permohonan

Permohonan dinyatakan lengkap bila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk pengajuan permohonan menurut jenis kreditnya. Selama permohonan kredit sedang dalam proses, maka

berkas-berkas permohonan harus dipelihara dalam berkas permohonan.

5. Formulir Daftar Isian Permohonan Kredit

Untuk memudahkan bank memperoleh data yang diperlukan, bank menggunakan daftar isian permohonan kredit yang harus diisi oleh nasabah, formulir-formulir neraca, daftar rugi laba.

2.2.8.2 Penyidikan dan Analisis Kredit

Penyidikan (investigasi) kredit adalah suatu pekerjaan yang harus dilakukan sebelum permohonan kredit disetujui atau ditolak. Dalam penyidikan, pekerjaan yang pertama kali dilakukan adalah melakukan wawancara dengan debitur, setelah itu mengumpulkan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan kepada nasabah, baik data intern maupun ekstern. Dalam hal ini termasuk informasi antarbank dan pemeriksaan pada daftar-daftar kredit macet. Kemudian melakukan pemeriksaan/penyidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi lainnya yang diperoleh, dan penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah dilaksanakan.

Yang dimaksud dengan analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi:

1. Pekerjaan yang mempersiapkan pekerjaan penilaian dari segala aspek baik keuangan maupun nonkeuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat/tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit.
2. Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penilaian dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan-keputusan dari permohonan kredit nasabah.

Pekerjaan penyidikan dilakukan oleh petugas yang bertugas sebagai penyidik kredit, sedangkan pekerjaan analisis dilakukan oleh kredit analisis. Pembagian kerja tersebut apabila kondisi organisasi bagian kredit memungkinkan. Namun apabila bank tidak memiliki petugas khusus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut, maka penyidikan dan analisis dilakukan oleh pejabat tertinggi pada bank yang bersangkutan, karena pimpinan bank dianggap sesuai untuk dapat melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tersebut.

Bank perlu mengadakan penelitian mengenai kewajaran dan kebenaran atas data dan informasi yang diperoleh dari nasabah sebelum bank melakukan analisis-analisis selanjutnya yang tingkatnya lebih tinggi. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya penarikan kesimpulan yang kurang tepat serta untuk menghindari keterlambatan pengambilan keputusan.

2.2.8.3 Keputusan dan Permohonan Kredit

Keputusan adalah setiap tindakan manajer yang berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui dan atau mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada manajer yang lebih tinggi. Setiap keputusan permohonan kredit harus memperhatikan penilaian syarat-syarat umum yang pada dasarnya tercantum dalam laporan pemeriksaan kredit dan analisis kredit. Bahan pertimbangan atau informasi-informasi lainnya yang diperoleh manajer pengambil keputusan, harus ditambahkan secara tertulis.

Jumlah permohonan dalam jenis kredit ditentukan oleh direksi kantor pusat, kepala bagian kredit/kepala cabang diberi wewenang untuk memutuskan permohonan dalam batas-batas tertentu tanpa mengusulkan terlebih dahulu kepada kantor pusat. Jika permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah di luar batas wewenang kepala cabang, maka cabang harus mengusulkan terlebih

dahulu permohonan fasilitas kredit tersebut kepada direksi kantor pusat disertai hasil penilaian yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian setelah permohonan kredit itu dipelajari maka direksi kantor/kantor pusat akan memberikan keputusan permohonan fasilitas kredit yang dilakukan oleh bagian kredit/kepala cabang setelah mengadakan penilaian permohonan fasilitas kredit yang diusulkan. Untuk jenis-jenis kredit yang menurut ketentuan memerlukan persetujuan dari Bank Indonesia, terlebih dahulu kantor pusat akan meneruskan permohonan kredit tersebut kepada Bank Indonesia. Pemberitahuan keputusan kepada cabang, baru dilakukan setelah mendapat keputusan dari Bank Indonesia.

Pada saat bagian kredit/cabang memutuskan untuk mengusulkan permohonan kredit kepada direksi/kantor pusat, maka dalam surat usul harus memuat informasi mengenai nasabah yaitu mengenai perilaku atau karakter nasabah, kemampuan dan pengalaman berusaha, dan hal-hal yang mencerminkan kepribadian serta kemampuan nasabah/calon nasabah sebagai ukuran dari sebagian sumber dan daya pelunasan kreditnya. Kemudian data mengenai aktifitas usaha yang dilakukan oleh calon nasabah. Setelah itu mengenai jaminan yang disertakan, serta laporan keuangan perusahaan calon nasabah.

2.2.8.4 Penolakan Permohonan Kredit

Penolakan ini adalah untuk permohonan kredit yang nyata-nyata dianggap oleh bank yang secara teknis tidak memenuhi persyaratan langkah-langkah yang harus diperhatikan adalah semua keputusan penolakan harus disampaikan secara tertulis kepada nasabah yang disertai alasan penolakannya. Surat penolakan permohonan minimal dibuat dalam rangkap tiga (asli dikirimkan

kepada pemohon, lembar kedua copy (salinan) surat permohonan nasabah dikirim kepada direksi, dan lembar ketiga untuk arsip bagian kredit atau cabang).

Dalam hal penolakan permohonan baru, maka jika diminta semua berkas permohonan dapat dikembalikan kepada pemohon kecuali surat permohonannya. Dalam penolakan permohonan perpanjangan, berarti jangka waktu kredit tidak diperpanjang. Bank harus menegaskan kepada nasabah agar segera menyelesaikan semua kewajibannya kepada bank atau mengajukan rencana pelunasannya.

2.2.8.5 Persetujuan Permohonan Kredit

Yang dimaksud persetujuan permohonan kredit adalah keputusan bank untuk mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur (nasabah). Untuk melindungi kepentingan bank dalam pelaksanaan persetujuan tersebut, maka biasanya ditegaskan terlebih dahulu syarat-syarat fasilitas kredit dan prosedur yang harus ditempuh oleh nasabah langkah-langkah yang harus diambil antara lain seperti surat penegasan persetujuan permohonan kredit kepada pemohon (nasabah) yang disampaikan secara tertulis.

Dalam pengikatan jaminan kredit, harus diperhatikan perbedaan jenis jaminan seperti jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminan pokok terdiri dari barang-barang bergerak maupun tidak bergerak dan/tagihan yang langsung berhubungan dengan aktivitas usahanya yang dibiayai dengan kredit. Jaminan tambahan dapat berupa jaminan pribadi serta jaminan bank, barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak yang tidak dijamin sebagai jaminan pokok pada umumnya berupa tanah, BPKB dan surat-surat bukti kepemilikan lainnya. Nasabah harus menandatangani duplikat surat penegasan pemberian

kredit di atas materai yang cukup dan mengembalikannya kepada bank, dan nasabah harus menandatangani surat perjanjian kredit.

2.2.8.6 Pencairan Fasilitas Kredit

Pencairan fasilitas kredit adalah setiap transaksi dengan menggunakan kredit yang disetujui oleh pihak bank. Dalam prakteknya, pencairan kredit ini berupa pembayaran dana atau pemindahbukuan atas beban rekening pinjaman atau fasilitas lainnya. Bank hanya menyetujui pencairan kredit oleh nasabah, bila syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah telah dilaksanakan. Pengikatan jaminan secara sempurna dan penandatanganan perjanjian kredit mutlak harus mendahului pencairan kredit.

Cara pencairan kredit yang telah disetujui dapat dilakukan dengan alat-alat dan cara yang telah ditentukan oleh bank, antara lain pencairan dengan cara menarik cek atau giro bilyet, dengan kuitansi, dengan dokumen-dokumen lainnya yang oleh bank dapat diterima sebagai perintah pembayaran, atau dengan pemindahbukuan atas beban rekening pinjaman nasabah. Alat-alat pencairan kredit seperti cek, kuitansi, nota pemindahbukuan, dan dokumen-dokumen lainnya tersebut akan menjadi alat bukti pembukuan. Apabila diperlukan alat bukti tersebut untuk berkas perkreditan, maka dapat dibuatkan duplikat atau fotokopinya.

2.2.8.7 Pelunasan Fasilitas Kredit

Pelunasan kredit adalah dipenuhinya semua kewajiban utang nasabah terhadap bank yang berakibat terhapusnya ikatan perjanjian kredit. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelunasan kredit adalah memperhitungkan semua kewajiban utang nasabah yang harus segera diselesaikan sampai dengan

tanggal pelunasan yaitu utang pokok, utang bunga, denda-denda jika ada, dan biaya administrasi lainnya.

2.3 Efektivitas

2.3.1 Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil. Menurut Handyaningrat (2002:16), efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Komarudin (2000:269) menyatakan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan (atau kegagalan) kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu.

Mahmudi (2008:92) mendefinisikan efektivitas sebagai hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan.

Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat mengenai hubungan arti efektivitas di bawah.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{outcome}}{\text{Output}}$$

Sumber: Mahmudi, 2005:92

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna dari suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh

mana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Hal ini berarti bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki.

2.3.2 Ukuran Efektivitas

Ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauh mana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

Hal-hal yang mempengaruhi efektivitas adalah ukuran, tingkat kesulitan, kepuasan, hasil dan kecepatan serta individu atau organisasi dalam melaksanakan sebuah kegiatan/program tersebut. Disamping itu adanya evaluasi apabila terjadi kesalahan pengertian pada tingkat produktivitas yang dicapai, sehingga akan tercapai suatu kesinambungan (*sustanbility*).

2.4 Pengendalian Kredit Bank

2.4.1 Pengertian dan Tujuan Pengendalian Kredit Bank

Pengendalian kredit mutlak dilaksanakan untuk menghindari terjadinya kredit macet dan penyelesaian kredit macet. Hasibuan (2006:105) menjelaskan bahwa pengendalian kredit adalah usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif, dan tidak macet.

Lancar dan produktif artinya kredit itu dapat ditarik kembali bersama bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak. Hal ini penting karena jika kredit macet berarti kerugian bagi bank yang bersangkutan. Oleh karena itu, penyaluran kredit harus didasarkan pada prinsip

kehati-hatian dan dengan sistem pengendalian yang baik dan benar. Tujuan pengendalian kredit antara lain adalah untuk:

- a. Menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman
- b. Mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak
- c. Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah
- d. Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan
- e. Memperbaiki kesalah-kesalahan karyawan analisis kredit dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali
- f. Mengetahui posisi persentase *collectability credit* yang disalurkan bank
- g. Meningkatkan moral dan tanggung jawab karyawan analisis kredit bank

2.4.2 Sistem dan Jenis-Jenis Pengendalian Kredit

Sistem pengendalian kredit, antara lain:

- a. *Internal Control of Credit* adalah sistem pengendalian kredit yang dilakukan oleh karyawan bank bersangkutan. Cakupannya meliputi pencegahan dan penyelesaian kredit macet.
- b. *Audit Control of Credit* adalah sistem pengendalian atau penilaian masalah yang berkaitan dengan pembukuan kredit. Jadi pengendalian atas masalah khusus, yaitu tentang kebenaran pembukuan kredit bank.
- c. *External Control of Credit* adalah sistem pengendalian kredit yang dilakukan pihak luar, baik oleh Bank Indonesia maupun akuntan publik.

Adapun jenis-jenis pengendalian kredit

- a. *Preventive Control of Credit* adalah pengendalian kredit yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum kredit tersebut macet. *Preventive Control of Credit* dilakukan dengan cara:
 1. Penetapan plafond kredit atau batas maksimum pemberian kredit.
 2. Pemantauan debitur.
 3. Pembinaan debitur.
- b. *Represstive Control of Credit* adalah pengendalian kredit yang dilakukan melalui tindakan penagihan penyelesaian setelah kredit tersebut macet. Tindakan pengamanan atau penyelesaian kredit macet dengan cara *reschedulling*, *reconditoring*, *restructuring*, dan *liquidation*. Tegasnya kredit yang telah macet harus diselesaikan dengan cara menyita penggunaan kredit bersangkutan untuk membayar pinjaman debitur.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian merupakan desain penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang terbatas pada usaha untuk mengungkap suatu masalah, keadaan, dan peristiwa yang terjadi, sehingga penelitian ini mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya. Penelitian yang dilakukan pada PT ABC ini di golongkan dalam studi kasus.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT ABC yang beralamat di Makassar, Sulawesi Selatan.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data non-angka yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk informasi baik lisan maupun tulisan seperti sejarah terbentuknya PT ABC, struktur organisasi dan kebijakan perusahaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui observasi langsung dan mengadakan wawancara secara langsung dengan pimpinan perusahaan untuk mendapatkan data-data yang relevan dengan penelitian ini.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis perusahaan, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, data ini bersumber dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab atau tatap muka secara langsung dengan pimpinan perusahaan dan staf personil yang ada kaitannya dengan masalah penelitian yang akan dibahas.
2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen perusahaan yang relevan dengan masalah penelitian yang akan dibahas.
3. Tinjauan Kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur, karya ilmiah, serta bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

3.5 Metode Analisis

Menurut Sugiyono (2011:244) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2011:246), mengemukakan bahwa aktivitas

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Spradley dalam Sugiyono (2011:253) menjelaskan mengenai proses penelitian berangkat dari yang luas, kemudian memfokus, dan meluas lagi. Menurutnya, terdapat tahapan analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif yaitu analisis domain, taksonomi, komponensial, dan analisis tema kultural.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data di lapangan. Sebelum wawancara peneliti membagi kuesioner sebanyak 30 dan mendapatkan informasi untuk diwawancarai dari kuesioner yang dibagikan. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti dapat melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

Rumus yang digunakan dalam menghitung hasil jawaban kuesioner menggunakan rumus efektivitas dari Mahmudi, 2005:92. Untuk kepentingan hasil perhitungan persentase, penulis akan menggunakan ketentuan yang dikemukakan berdasarkan rumusan Champion (1990:32) yang dikutip dalam bukunya *Basic Statistic For Social Research* menyebutkan klasifikasi sebagai berikut:

1. 0,00-0,25 = *No association or low association (weak association)*
2. 0,26-0,50 = *Moderately low association (moderation association)*
3. 0,51-0,75 = *Moderately high association (moderation strong association)*
4. 0,76-1,00 = *High association (strong association up to perfect association)*

Klasifikasi tersebut di atas maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. 0%-25% = penerapan pengendalian internal tidak efektif dalam menunjang prosedur pemberian kredit.
2. 26%-50% = penerapan pengendalian internal kurang efektif dalam menunjang prosedur pemberian kredit.
3. 51%-75% = penerapan pengendalian internal cukup efektif dalam menunjang prosedur pemberian kredit.
4. 76%-100% = penerapan pengendalian internal sangat efektif dalam menunjang prosedur pemberian kredit.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data dengan menggunakan alat analisis efektivitas penerapan sistem pengendalian internal pemberian kredit pada penelitian Ahmad (2013) yang disajikan pada table 3.1. Hasil pembahasan mengenai.

1. Penjelasan mengenai sistem pemberian kredit PT Bank ABC
2. Penjelasan mengenai sistem pengendalian internal PT. Bank ABC
3. Memaparkan efektivitas sistem pengendalian internal pemberian kredit PT. Bank ABC.

BAB V

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan efektivitas sistem pengendalian internal pada PT Bank ABC, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pemberian kredit yang dilaksanakan oleh PT Bank ABC terdiri atas beberapa prosedur yaitu prosedur permohonan kredit, prosedur penyelidikan dan analisis kredit, prosedur persetujuan permohonan kredit, prosedur pencairan fasilitas kredit, dan prosedur pelunasan fasilitas kredit.
2. Sistem pemberian kredit yang dilaksanakan oleh PT Bank ABC tersebut telah didukung oleh penerapan sistem pengendalian internal yang sangat efektif, dan telah memenuhi kelima elemen sistem pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian (*control environment*), penafsiran risiko (*risk assessment*), aktivitas pengendalian (*control activities*), informasi dan komunikasi (*information and communication*), dan pemantauan (*monitoring*)

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan efektivitas sistem penafsiran risiko perusahaan sebaiknya dilakukan perputaran pegawai. Hal ini untuk mencegah terjadinya risiko yang terkait dengan Korupsi, kolusi, dan nepotisme.

2. Penelitian selanjutnya dapat membandingkan efektivitas penerapan pengendalian internal pemberian kredit antar bank yang satu dengan bank yang lainnya.

6.3 Keterbatasan Penelitian

Adanya pembatasan untuk menampilkan objek penelitian oleh pihak reponden, mengakibatkan pembaca tidak dapat memperoleh gambaran menyeluruh tentang objek yang menjadi sasaran penelitian.

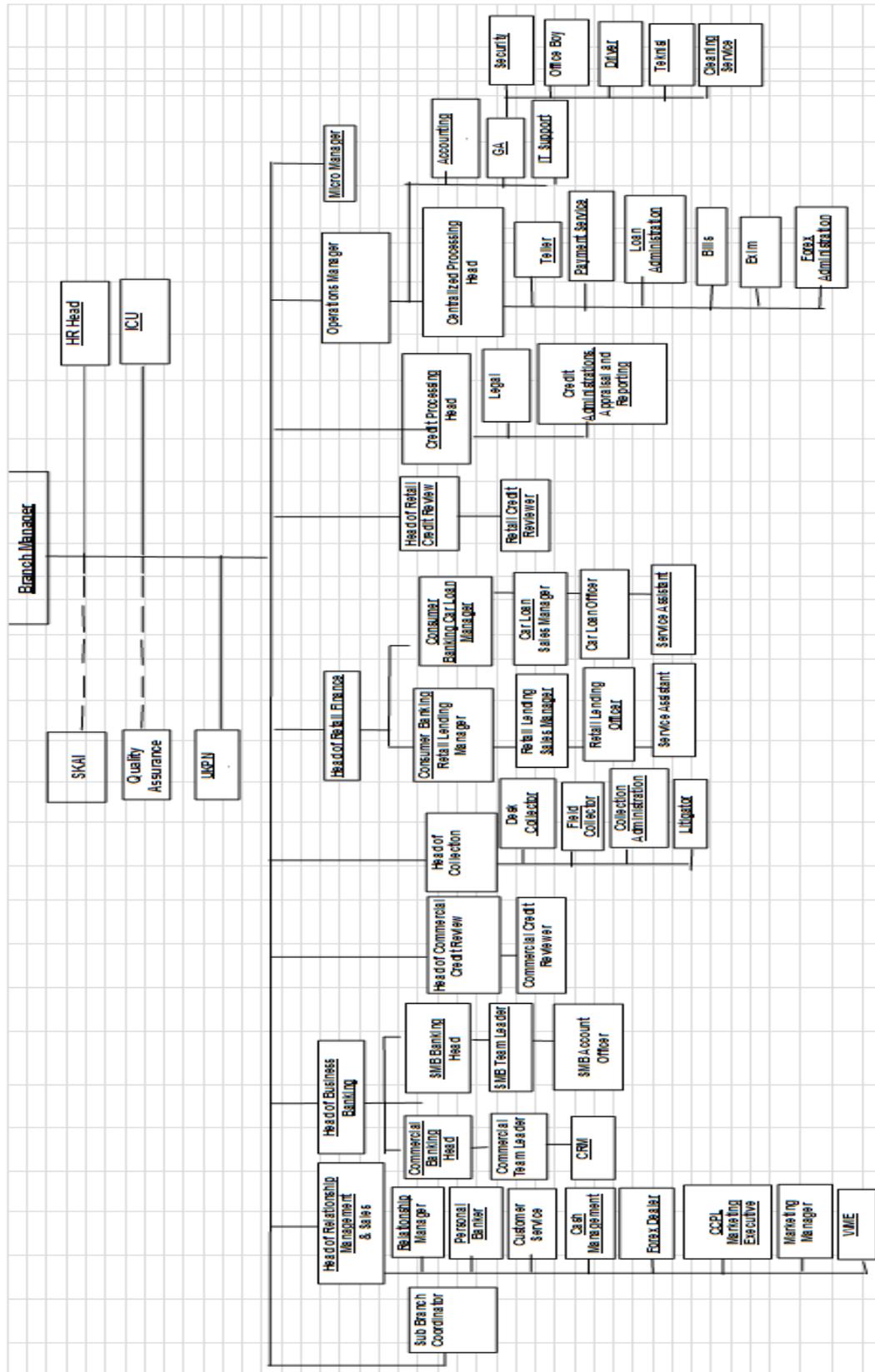
DAFTAR PUSTAKA

- Amanina, Ruzana. 2011. *Evaluasi terhadap sistem pengendalian internal pada proses pemberian kredit mikro (studi pada PT Bank Mandiri (PERSERO) tbk cabang majapahit* Semarang. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Ahmad, Amira. 2013. *Tinjauan Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada PT Bank Mega Cabang Makassar*. Skripsi tidak diterbitkan. Makassar: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Bahsan. 2003. *Pengantar Analisis Kredit Perbankan Indonesia, Cetakan Pertama*. Jakarta: CV. Rejeki Agung.
- Boynton, William C. Raymond N. Johnson. Walter G.Kell. 2003. *Modern Auditing, Edisi Tujuh*. Ahli Bahasa Paul A, Gina, Gania, IchsanSetito Budi. Jakarta: Erlangga
- Budiyati. 2008. *Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit (Studi Kasus Pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Boyolali)*. Skripsi tidak diterbitkan. Surakarta: Fakultas Ekonomi Sebelas Maret Surakarta.
- Champion, Dean J. 1981. *Basic Statistic For Social Research*. Edisi Kedua. Cincinnati, Ohio, South-Western Publishing Co.
- Fahmi, Irham dan Yovi Lavianti Hadi. 2010. *Pengantar Manajemen Kredit*. Bandung: Alfabeta.
- Hadiwidjaja, Rivai Wieasasmita. 2003. *Analisis Kredit*. Bandung: Pionir Jaya.
- Handayani, Soewarno. 2002, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: PT. Toko Agung.
- Hall, James A. 2011. *Principles of Accounting Information Systems*. Singapore: South-Western, Cengage Learning.
- Hasibuan, Malay S.P. 2006. *Dasar-dasar Perbankan, Cetakan Kelima*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Jakarta: Erlangga.
- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Komarudin. 2000. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi (Edisi 3)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Kedua. Jakarta: UPP

- Moeller, Robert. 2009. *Brink's Modern Internal Auditing*. Canada: John Wiley & Sons.
- Mulyadi. 2002. *Auditing, Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Papalangi, Riska S. 2013. Penerapan SPI dalam Menunjang Efektivitas Pemberian Kredit UKM Pada PT. BRI (Persero) Tbk Manado. *Jurnal EMBA vol 1, 3*.
- Riandari, Esti. 2013. *Analisis Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran Kas di Biro Keuangan Sekretariat Negara*. Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Sastradipoera, Komarudin. 1994. *Pengantar Manajemen Perusahaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sumarsan, Thomas. 2010. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Indeks. Jakarta
- Suryatno, Thomas. 2003. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tangkilisian, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI
- Triwahyuni, Nani. 2009. *Pelaksanaan Analisis Pemberian Kredit di PT Bank Huga Cabang Semarang*. Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

LAMPIRAN

Lampiran I



Lampiran II

Rekapitulasi Jawaban Kuesioner

No. Kuesioner	Jawaban			Total
	Ya	Tidak	Tidak Relevan	
1	30	0	0	30
2	30	0	0	30
3	30	0	0	30
4	30	0	0	30
5	30	0	0	30
6	30	0	0	30
7	30	0	0	30
8	29	1	0	30
9	30	0	0	30
10	30	0	0	30
11	30	0	0	30
12	30	0	0	30
13	30	0	0	30
14	30	0	0	30
15	30	0	0	30
16	30	0	0	30
17	30	0	0	30
18	30	0	0	30
19	30	0	0	30
20	30	0	0	30
21	30	0	0	30
1	30	0	0	30
2	30	0	0	30
3	30	0	0	30
4	30	0	0	30
5	30	0	0	30
6	30	0	0	30
7	30	0	0	30
8	30	0	0	30
9	30	0	0	30
10	1	29	0	30
11	29	1	0	30
12	30	0	0	30
13	30	0	0	30
14	30	0	0	30
15	30	0	0	30
16	30	0	0	30
17	30	0	0	30
18	30	0	0	30
19	30	0	0	30
20	30	0	0	30
21	30	0	0	30
22	30	0	0	30
23	30	0	0	30
24	30	0	0	30
25	30	0	0	30
26	30	0	0	30
27	30	0	0	30
28	30	0	0	30
29	30	0	0	30
30	30	0	0	30
31	30	0	0	30
TOTAL	1529	31	0	1560

Lampiran III

PETA TEORI

No	Penulis/Topik/Judul Buku/Artikel	Tujuan Penelitian/Penulis an Buku/Artikel	Konsep/Teori/ Hipotesis	Variabel Penelitian dan Teknik Analitis	Hasil Penelitian/Isi Buku
1	Amira Ahmad.,2013, Tinjauan Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada PT Bank Mega Cabang Makassar	Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pemberian kredit PT. Bank Mega Cabang Makassar dan Mengetahui penerapan sistem pengendalian internal pemberian kredit pada PT. Bank Mega Cabang Makassar.	Penelitian ini melakukan penyebaran kuesioner guna mengetahui sistem pengendalian internal pemberian kredit pada PT Bank mega	<ol style="list-style-type: none"> 1.Observasi, yaitu penulis mengadakan pengamatan langsung pada PT Bank Mega Cabang Makassar, dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. 2. Dokumentasi, yakni mengumpulkan data berdasarkan dokumen-dokumen dan laporan tertulis lainnya yang terkait langsung dengan penelitian ini. 3. Wawancara, yaitu melakukan wawancara langsung terhadap responden untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. 4. Kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan 	Adanya prosedur pemberian kredit yang jelas serta sistem pengendalian internal pemberian kredit yang sangat efektif pada PT. Bank Mega Cabang Makassar menjadi sebuah bukti nyata atas usaha PT. Bank Mega Tbk untuk mencapai visi dan misinya, serta menjadi alasan bagi calon debitur memilih PT. Bank Mega untuk memfasilitasi kebutuhan mereka di bidang perkreditan.

				data dan informasi dengan menggunakan daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden mengenai masalah yang akan diteliti.	
2	Ruzanna Amanina., 2011, Evaluasi Terhadap Sistem Pengendalian Internal Pada Proses Pemberian Kredit (Studi pada PT Bank Mandiri (PERSERO) tbk Cabang Majapahit Semarang)	Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Mengevaluasi proses pemberian kredit yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan asas perkreditan yang sehat pada Bank Mandiri Cabang Majapahit Semarang. 2. Mengevaluasi efektifitas sistem pengendalian intern pada proses pemberian kredit mikro pada Bank Mandiri Cabang Majapahit Semarang.		a. Wawancara Wawancara merupakan pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. Teknik wawancara ini dilakukan secara formal dan intensif sehingga akan mampu memperoleh informasi sebanyak mungkin secara jujur dan detail. Wawancara dalam penelitian ditujukan kepada manajer dan bagian kredit untuk mengetahui sejarah perusahaan, struktur organisasi, prosedur pemberian kredit serta sistem pengamanan dan pengawasan yang dilakukan.	Pengujian kepatuhan dilakukan terhadap sistem pengendalian intern dengan menggunakan metode <i>fixed sample size</i> . Penentuan jumlah sampel yang dipilih menggunakan bantuan tabel angka random, menetapkan tingkat keandalan (<i>reliability level</i>) 95% dan batas ketepatan tertinggi yang diharapkan (<i>Desired Upper Precision Limit/ DUPL</i>) 5%. Hasil yang diperoleh dari pengujian kepatuhan ini adalah jumlah batas ketepatan yang dicapai (<i>Achieved Upper Precision Limit / AUPL</i>) sebesar 3%.

				<p>b. Kuesioner Kuesioner adalah cara untuk memperoleh informasi dengan memberikan daftar pertanyaan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner untuk penelitian ini disusun dengan menggunakan unsur-unsur pengendalian intern sebagai panduannya.</p> <p>c. Observasi Observasi atau pengamatan merupakan peninjauan secara langsung untuk mengetahui jalannya prosedur pemberian kredit pada perusahaan.</p>	<p>Dari hasil tersebut, AUPL lebih kecil atau sama dengan DUPL, maka pengendalian intern yang ada dikatakan efektif. Hal ini dapat diartikan bahwa unsur-unsur pengendalian intern yang terdapat dalam proses pemberian kredit telah dilaksanakan oleh manajemen. Kesimpulan dari penelitian adalah bahwa sistem pengendalian intern yang ada pada proses pemberian kredit mikro memadai dan telah dilaksanakan oleh manajemen.</p>
--	--	--	--	--	---

**Lampiran IV
Daftar Pertanyaan Kuesioner**

Efektivitas Penerapan Pengendalian Internal Pemberian Kredit

EFEKTIVITAS PENERAPAN PENGENDALIAN INTERNAL PEMBERIAN KREDIT				
NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK	TIDAK RELEVAN
Prosedur Pemberian Kredit				
1	Apakah setiap surat permohonan kredit dicatat dalam register?			
2	Apakah bank menggunakan daftar isian permohonan kredit yang harus diisi oleh nasabah?			
3	Apakah pekerjaan penyidik dan analisis dilakukan oleh petugas atau pejabat yang berbeda?			
4	Apakah wawancara dengan permohonan kredit selalu dilakukan pada saat penyidikan?			
5	Apakah dalam analisa kredit melakukan analisis laporan keuangan dan non keuangan?			
6	Apakah ada batasan bagi pejabat yang berwenang dalam mengambil keputusan?			
7	Apakah pejabat yang berwenang untuk memutuskan keputusan kredit, harus memutuskan permohonan fasilitas kredit terlebih dahulu apabila plafond kreditnya diluar kewenangan?			
8	Apakah setiap penolakan kredit, pemohon secara teknis tidak memenuhi syarat?			
9	Apakah semua keputusan penolakan disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasannya?			
10	Apakah dalam persetujuan kredit ditegaskan syarat-syarat fasilitas kredit dan prosedur yang harus ditempuh oleh debitur atau nasabah?			
11	Apakah pengikatan jaminan secara sempurna dan penandatanganan warkat-warkat harus mutlak terlebih dahulu dilaksanakan sebelum pencairan kredit?			
12	Apakah bukti pencairan kredit dibuatkan copy atau salinannya?			

Aspek Pengawasan				
13	Apakah dilakukan pengawasan pada jumlah plafond kredit?			
14	Apakah dilakukan pengawasan terhadap jaminan?			
15	Apakah dilakukan pengawasan pada lampiran permohonan kredit?			
16	Apakah dalam pengawasan meninjau setoran jaminan?			
17	Apakah pengawasan meninjau laporan kegiatan usaha nasabah?			
18	Apakah dilakukan pengawasan pada aspek-aspek lain yang perlu diperhatikan dalam analisa kredit?			
19	Apakah dalam pengawasan administrasi dapat diketahui penyimpangan yang terjadi?			
20	Apakah dilaksanakan pengawasan administrasi debitur atau nasabah secara individu?			
21	Apakah dilaksanakan pengawasan administrasi debitur atau nasabah secara keseluruhan?			
KOMPONEN PENGENDALIAN INTERNAL				
Lingkungan Pengendalian				
1	Apakah kebijakan dan prosedur pemberian kredit yang telah ditetapkan, dilaksanakan oleh orang-orang yang kompeten?			
2	Apakah ada tindakan manajemen yang dilaksanakan secara intensif untuk mengurangi tindakan pegawai yang berbuat tidak jujur?			
3	Apakah manajemen memiliki filosofi dan gaya operasi tertentu yang cukup menunjukkan tindakan-tindakan kreatif?			
4	Apakah dalam perusahaan memiliki struktur organisasi yang jelas menerangkan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab?			
5	Apakah perusahaan memiliki satuan komite audit?			
6	Apakah terdapat deskripsi tugas pegawai dan kebijakan terkait dalam hubungannya dengan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab?			

7	Apakah terdapat kebijakan dan prosedur kepegawaian dalam upayanya mendapatkan SDM yang jujur dan kompeten terhadap tugasnya?			
8	Apakah terdapat flowchart prosedur pemberian kredit dan dipahami flowchart tersebut?			
Penafsiran Risiko				
9	Apakah manajemen melakukan penaksiran risiko atas kemungkinan salah saji laporan keuangan yang meliputi kejadian-kejadian internal dan eksternal yang timbul karena: Perubahan dalam lingkungan operasional atas pemberian kredit dalam perusahaan?			
10	Penempatan karyawan baru dalam aktivitas pemberian kredit?			
11	Perubahan dalam sistem informasi pemberian kredit?			
12	Peningkatan aktivitas pemberian kredit?			
13	Sosialisasi penggunaan teknologi informasi baru dalam aktivitas pemberian kredit?			
14	Perubahan pada penggunaan prinsip-prinsip akuntansi dalam pemberian kredit?			
Aktivitas Pengendalian				
15	Apakah pemberian kredit memberikan otorisasi dari pejabat yang berwenang?			
16	Apakah bukti pemberian kredit masuk terdiri dari beberapa rangkapan dan didistribusikan kepada bagian yang berbeda guna kepentingan pengawasan internal?			
17	Apakah saldo kredit yang ada dapat dijamin perlindungannya dari kemungkinan besar penipuan?			
18	Apakah pencatatan dalam jurnal pemberian kredit didasarkan pada bukti kredit masuk yang telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang dan dilampiri oleh dokumen lengkap?			
19	Apakah fungsi pemberian kredit dilengkapi oleh alat-alat yang dapat mencegah tindakan penipuan terhadap aktivitas kredit yang dilaksanakan?			
20	Apakah kredit yang sedang dalam proses, mendapatkan perlindungan asuransi?			

21	Apakah kredit yang sedang berjalanmendapatkan perlindungan asuransi?			
22	Apakah terdapat fungsi yang tidak terlihat dalam penyimpanan kredit, pemberian kredit dan pencatatan kredit yang menggunakan rekening Koran bank untuk mengecek ketelitian, dan keakuratan catatan pemberian kredit?			
23	Apakah dokumen pemberian kredit telah bernomor urut tercetak?			
24	Apakah terdapat pengecekan independen untuk menguji kesesuaian jumlah pemberian kredit dengan data kas yang diterima?			
Informasi dan Komunikasi				
25	Apakah terdapat sistem informasi yang mencakup metode-metode dan catatan-catatan untuk menunjukkan dan mencatat semua transaksi pemberian kredit yang sah?			
26	Apakah terdapat sistem informasi yang mencakup metode-metode catatan untuk menggambarkan dengan dasar yang tepat transaksi-transaksi yang cukup rinci untuk membenarkan pengklasifikasian dan transaksi dalam laporan keuangan secara wajar?			
27	Apakah terdapat sistem informasi yang mencakup metode-metode dan catatan-catatan untuk mengukur nilai transaksi pemberian kredit yang benar dalam mencatat nilai moneterinya di dalam laporan keuangan yang wajar?			
28	Apakah terdapat sistem informasi yang mencakup metode-metode dan catatan-catatan untuk transaksi pemberian kredit yang mengungkapkan pemberian kredit yang berhubungan dengan laporan keuangan secara wajar dalam perusahaan?			
29	Apakah terdapat sistem informasi yang mencakup metode-metode dan catatan-catatan dalam hal posting dan pengikhtisaran yang benar atas transaksi-transaksi pemberian kredit?			
30	Apakah terdapat sistem informasi yang mencakup metode-metode dan catatan-catatan dalam penotorisasian transaksi-transaksi pemberian kredit oleh pejabat yang berwenang?			

Pemantauan				
31	Apakah manajemen melakukan aktivitas pemantauan untuk menilai efektivitas rancangan dan operasi pengendalian internal pemberian kredit			

Sumber: Ahmad (2013) diolah